

# **PENGEMBANGAN MODUL EDUKASI LITERASI KEUANGAN ISLAM DAN PRODUK HALAL DENGAN “ADDIE”**

**Ikka Nur Wahyuni**  
*Magister Pendidikan Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta*  
*ikka@student.uns.ac.id*

## **ABSTRAK**

*Tingkat kepatuhan ketentuan edukasi dan perlindungan konsumen lembaga keuangan masih rendah. Kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan masih terdapat kerancuan antara kegiatan edukasi dengan marketing sehingga tujuan dari financial education kerap tidak tercapai (OJK dalam Wahyuni, 2015:01). Jika dibandingkan dengan negara lain, financial education di Indonesia masih sangat rendah, baik dari sektor pendidikan formal maupun informal. Diperlukan adanya edukasi bagi UMKM di bidang pengelolaan keuangan dan juga produk halal agar pangsa pasar halal di Indonesia dapat dikuasai oleh pengusaha Indonesia. Ketiadaan modul sebagai sarana pembelajaran dapat dikembangkan dengan model ADDIE. Gagasan ini dikembangkan karena model ADDIE merupakan model yang mudah diterapkan dimana proses yang digunakan bersifat sistematis dengan kerangka kerja yang jelas menghasilkan produk yang efektif, kreatif, dan efisien (Learning, 2008: 5). model ADDIE merupakan salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah di pelajari, terdiri dari 5 fase yaitu analysis (analisis), design (desain), development (pengembangan), implementation (implementasi), evaluation (evaluasi).*

*kata kunci: modul, edukasi umkm, literasi keuangan islam, literasi produk halal, ADDIE*

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Perkembangan industri halal dan keuangan syariah di dunia sangat pesat. Belanja muslim dunia pada tahun 2013 mencapai US\$ 2.001 miliar atau setara dengan 12% dari seluruh pasar dunia. Pangsa pasar muslim potensial ini diprediksi akan mencapai US\$ 3.735 miliar pada tahun 2019 (Reuters & Standard, 2014). Tercatat belanja dunia di sektor makanan dan gaya hidup halal mencapai US\$ 2 triliun dan pengeluaran di sektor industri keuangan syariah mencapai US\$ 1.66 triliun pada tahun 2013 (Reuters dan Standard, 2014).

Belanja muslim dunia di sektor makanan meningkat 10,8% mencapai US\$ 1.292 milyar. Belanja makanan halal dunia pada tahun 2019 diprediksi meningkat hingga US\$ 2.537 milyar atau setara dengan 21,2% belanja dunia. Konsumen produk halal terbesar adalah Indonesia dengan total belanja halal mencapai US\$190 milyar, melebihi Turki dengan belanja US\$168 Milyar, dan Pakistan yang hanya sejumlah US\$ 108 Milyar (Reuters dan Standard, 2014: 22). Ironisnya Indonesia dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim dan konsumen produk halal terbesar bukanlah produsen produk halal terbesar. *Global Islamic Economic Index* 2013 yang mengukur perkembangan perekonomian Islam di seluruh dunia menempatkan Indonesia peringkat 10, jauh dari Malaysia (Reuters dan Standard, 2014: 23).

Rendahnya peringkat Indonesia pada *Global Islamic Economic Index* disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah rendahnya *halal literacy* dan *financial literacy* para pelaku usaha. Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY, Priyonggo Suseno mengatakan, UKM di DIY saat ini, jumlahnya mencapai sekitar 83 ribu, separuhnya bergerak dalam industri kuliner. Tetapi, dari data terakhir yang diakses dari LPPOM MUI DIY, baru 0,75 persen, atau 299 UKM kuliner yang

mendapatkan sertifikat halal. Hal ini terjadi salahsatunya karena kurangnya informasi "Kecilnya jumlah kuliner pemegang sertifikat halal ini, menunjukkan lemahnya perhatian masyarakat pada jaminan produk halal," terang Priyonggo. (Vivanews, 2016)

Pada sisi *islamic financial literacy*, pelaku usaha masih terganjal rendahnya tingkat *financial literacy*, sehingga pengetahuan pengelolaan keuangan usaha dan pengetahuan produk keuangan masih terbatas. Akibatnya, akses usaha ke lembaga keuangan masih rendah. *Financial literacy* sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya. (Chen dan Volpe, 1998:108). Beberapa tahun terakhir, banyak negara maju dan negara berkembang mengkhawatirkan masalah tingkat *financial literacy* warganya. Rendahnya tingkat *Financial literacy* masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan krisis keuangan terjadi, akibatnya *Financial literacy* sekarang diakui secara global sebagai elemen penting dari stabilitas ekonomi, keuangan, dan pembangunan (INFE dalam OECD, 2012:7). Penelitian yang dilakukan oleh Mastercard menunjukkan masyarakat Indonesia mempunyai skor di bawah rata-rata skor negara yang ada di Asean, padahal *financial literacy* merupakan salah satu komponen sumberdaya manusia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. *Financial literacy* berkembang pesat di berbagai belahan dunia, seperti di Amerika, Jerman, Italia, Swedia, Belanda, Jepang dan New Zealand (Lusardi dan Mitchell, 2011:497-508).

Di Indonesia, *Financial education* saat ini masih diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menetapkan peraturan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), namun pada kenyataannya jumlah PUJK yang menyampaikan laporan Rencana Edukasi hanya 438 PUJK dari 2.333 PUJK yang ada di Indonesia atau 15,78% saja. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan ketentuan edukasi dan perlindungan konsumen masih rendah. Kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan masih terdapat kerancuan antara kegiatan edukasi dengan marketing sehingga tujuan dari *financial education* kerap tidak tercapai (OJK dalam Wahyuni, 2015:01). Jika dibandingkan dengan negara lain, *Financial education* di Indonesia masih sangatlah rendah, baik dari sektor pendidikan formal maupun informal.

Konsep mengenai *financial literacy* banyak dipelajari oleh para peneliti. (Hung, et.al: 2009); (Glasser dan Weber: 2007); (Antara, Musa, dan Hasan, 2015). *Financial literacy* adalah kemampuan mengelola keuangan pribadi (Chen dan Volpe:1998). Kemampuan mengelola keuangan pribadi dibutuhkan individu untuk memanfaatkan produk keuangan secara optimal yang akan berpengaruh terhadap kualitas manusia. *Financial literacy* menurut Huston (2010) diartikan sebagai komponen sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Seseorang dikatakan melek keuangan ketika memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut.

Tingkat *financial literacy* tiap orang berbeda-beda, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan signifikan antara individu satu dengan yang lainnya dalam proses mengumpulkan aset baik jangka pendek maupun jangka panjang. Huston (2010) menjelaskan bahwa faktor -faktor seperti kebiasaan, kognitif, ekonomi, keluarga, teman sebaya, komunitas, dan institusi dapat berdampak pada kebiasaan keuangan (*financial behaviour*). Seseorang dikatakan melek keuangan (*financial literate*) ketika seseorang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Namun penelitian yang fokus pada konsep dan pengembangan *Islamic financial literacy* masih terbatas. (Antara, Musa, dan Hasan, 2015). Padahal tingkat *financial literacy* mempengaruhi *financial behaviour* seseorang (Xiao, et.al: 2014). Pemahaman dan kebiasaan mengenai dasar-dasar *Islamic financial literacy* juga mempengaruhi perilaku para pemilik usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan kaidah dan etika ekonomi Islam (Antara, Musa, dan Hasan, 2015).

Hal ini berdampak pada aset bank syariah yang dimiliki di sebuah negara. Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam sebesar 88% dari seluruh penduduk, namun hanya memiliki aset

bank syariah sebesar 4% dari seluruh populasi muslim. Jika dibandingkan dengan negara Malaysia yang hanya memiliki penduduk muslim sebesar 61% namun aset bank syariahnya sebesar 25% dari aset perbankan yang ada di Malaysia (SESCRIC:2012).

*Financial literacy* adalah kemampuan mengelola keuangan pribadi (Chen dan Volpe, 1998:108). Kemampuan mengelola keuangan pribadi dibutuhkan individu untuk memanfaatkan produk keuangan secara optimal yang akan berpengaruh terhadap kualitas manusia. *Financial literacy* menurut Huston (2010: 307-308) diartikan sebagai komponen sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Seseorang dikatakan melek keuangan ketika memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Financial literacy* adalah kemampuan mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan terdapat faktor yang dapat mempengaruhi *Financial literacy* baik faktor dari dalam diri individu seperti kemampuan kognitif dan psikologi maupun faktor di luar individu seperti keadaan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan pada hukum Islam ada tiga kategori produk untuk muslim yakni halal, haram, dan *mushbooh*. Halal dalam bahasa arab berarti diizinkan, bisa digunakan, dan sah menurut hukum (Yusoff, 2004). Kebalikan dari halal adalah haram yang berarti tidak diizinkan, tidak bisa digunakan, dan tidak sah menurut hukum sedangkan *mushbooh* (*syubha*, *shubhah*, dan *mashbuh*) berarti hitam putih, masih dipertanyakan, dan meragukan oleh karena itu sebaiknya dihindari.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001 tanggal 30 November 2001 pasal 1 menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia. Berdasarkan keputusan menteri tersebut dapat disimpulkan bahwa MUI adalah lembaga yang berwenang dalam mengaudit produk dan mampu menerbitkan sertifikat halal kepada perusahaan yang mengajukan uji halal kepada MUI. Sertifikat Halal inilah yang memberikan izin kepada perusahaan untuk bisa mencantumkan logo halal pada kemasan produk.

Menurut Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 pasal 1 menjelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia dan peralatan produksi, sistem manajemen halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal.

Proses pengajaran membutuhkan media pembelajaran untuk memudahkan penyampaian materi. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi atau substansi belajar dan evaluasi (Daryanto, 2013:9). Munadi (2010: 99) menyatakan bahwa modul merupakan bahan belajar yang dapat digunakan oleh siswa untuk belajar secara mandiri dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain. Modul dibuat berdasarkan program pembelajaran mandiri yang mengandung tujuan, bahan kegiatan belajar serta evaluasi. Oleh karena itu, cakupan bahasan modul lebih fokus dan terukur, serta lebih mementingkan aktifitas belajar pembacanya. Semua sajiannya disampaikan melalui bahasa yang komunikatif.

Mengembangkan sebuah modul, membutuhkan langkah-langkah yang sistematis agar tepat guna dan tepat sasaran. Model ADDIE pertama kali dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda pada tahun 1990-an (Molenda, 2008: 107). Model ADDIE merupakan model yang mudah diterapkan dimana proses yang digunakan bersifat sistematis dengan kerangka kerja yang jelas menghasilkan produk yang efektif, kreatif,

dan efisien (Learning, 2008: 5). Model ADDIE merupakan salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari, terdiri dari 5 fase yaitu *analysis* (analisis), *design* (desain), *development* (pengembangan), *implementation* (implementasi), *evaluation* (evaluasi) (Molenda, 2008: 107).

*Analysis* merupakan langkah pertama dari model desain sistem pembelajaran ADDIE. Langkah analisis melalui dua tahap yaitu: 1) Analisis Kinerja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. 2) Analisis kebutuhan. analisis ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu di pelajari oleh peserta untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Hal ini dapat dilakukan apabila program pembelajaran dianggap sebagai solusi dari masalah pembelajaran yang sedang dihadapi.

Langkah kedua adalah *Design* (desain). Langkah ini merupakan inti dari langkah analisis kerja yaitu mempelajari masalah kemudian menemukan alternatif solusi yang berhasil diidentifikasi melalui langkah analisis kebutuhan. Setelah materi tersusun, selanjutnya menyusun perangkat media. Media yang digunakan berupa modul. Draft media tersebut direvisi sehingga dihasilkan media yang sesuai dengan kebutuhan.

*Development* merupakan langkah ketiga dalam model desain sistem ADDIE. Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli, dan memodifikasi bahan ajar. Dengan kata lain mencakup kegiatan memilih, menentukan metode, media serta strategi pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam menyampaikan materi atau substansi program. Dalam melakukan langkah pengembangan ada dua tujuan penting yang perlu dicapai, antara lain adalah memproduksi, merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah di rumuskan sebelumnya. Langkah kedua adalah memilih media atau mengkombinasi media terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

*Implementation* atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah keempat dalam model desain sistem pembelajaran ADDIE. Tujuan utama dari langkah ini adalah membimbing peserta untuk mencapai tujuan atau kompetensi, menjamin terjadinya pemecahan masalah untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh peserta, dan memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran, peserta perlu memiliki kompetensi yang diinginkan.

Pada tahapan implementasi media yang telah dirancang dilakukan dengan cara uji satu-satu, uji kelompok kecil, uji kelompok besar, dan uji fasilitator. Uji satu-satu, uji kelompok kecil, dan uji kelompok besar untuk mendapat masukan dari peserta. Uji fasilitator untuk mendapat masukan dari fasilitator yang menndampingi program pemberdayaan ekonomi. Pada uji satu-satu akan dipilih 3 peserta, uji kelompok kecil dipilih 6 peserta, dan uji kelompok besar dipilih 10 peserta, pemilihan peserta tersebut bersifat acak.

Evaluasi adalah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Evaluasi terhadap program pembelajaran bertujuan untuk mengetahui sikap peserta terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan, mengetahui peningkatan kompetensi dalam diri pesertayang merupakan dampak dari keikutsertaan dalam program pembelajaran, dan memperoleh keuntungan yang dirasakan oleh lembaga akibat adanya peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini, akan dilakukan uji efektivitas yang akan ditentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen akan diberi perlakuan yang telah peneliti setting dengan menggunakan modul edukasi, sedangkan kelompok kontrol menggunakan media lain. Tahap evaluasi dan revisi merupakan tahap yang terakhir. Pada tahap revisi dilakukan terhadap semua komponen yang telah

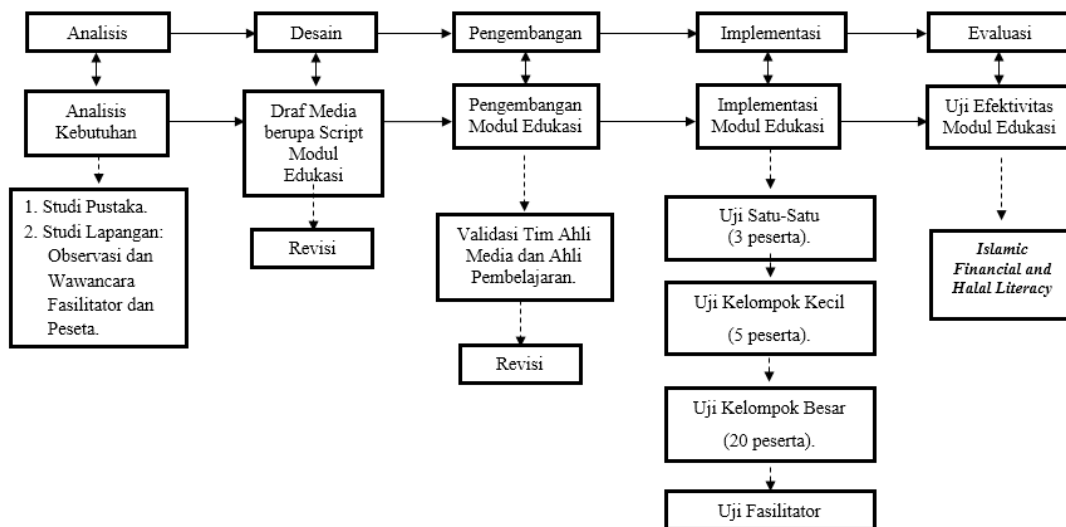
dipilih. Komponen revisi yang paling penting adalah dari peserta, karena peserta tersebut sebagai pengguna dari media.

## **BAB II. PEMBAHASAN**

Menanggapi rendahnya *Financial literacy* masyarakat, pemerintah, dalam hal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan edukasi mengenai *Financial literacy* dengan berbagai cara untuk menanggulangi rendahnya tingkat *Financial literacy* masyarakat Indonesia. OJK telah menetapkan peraturan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berbunyi "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat." (Pasal 14 POJK No. 1/POJK.07/2013). Namun pada kenyataannya, Jumlah PUJK yang menyampaikan Laporan Rencana Edukasi hanya 438 PUJK dari 2.333 PUJK yang ada di Indonesia atau 15,78% saja. (OJK:2015) Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan ketentuan edukasi dan perlindungan konsumen masih rendah. Aktivitas edukasi paling banyak dilaksanakan dalam agenda sosialisasi dan seminar dengan materi paling banyak mengenai pengetahuan sebesar 70,58% dari 980 kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan masih terdapat kerancuan antara kegiatan edukasi dengan *marketing*. Sehingga Indonesia perlu mencontoh sepak terjang beberapa negara yang telah melakukan sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam peningkatan kualitas *Financial literacy*.

Di sisi lain, pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terhadap produk halal masih rendah. Belum ada upaya khusus untuk meningkatkan kesadaran produk halal bagi pelaku usaha. Rendahnya peringkat Indonesia pada Global Islamic Economic Index disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah rendahnya *halal literacy* dan *financial literacy* para pelaku usaha. Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY, Priyonggo Suseno mengatakan, UKM di DIY saat ini, jumlahnya mencapai sekitar 83 ribu, separuhnya bergerak dalam industri kuliner. Tetapi, dari data terakhir yang diakses dari LPPOM MUI DIY, baru 0,75 persen, atau 299 UKM kuliner yang mendapatkan sertifikat halal. Hal ini terjadi salahsatunya karena kurangnya informasi "Kecilnya jumlah kuliner pemegang sertifikat halal ini, menunjukkan lemahnya perhatian masyarakat pada jaminan produk halal," terang Priyonggo. (Vivanews, 2016).

Model ADDIE merupakan model yang mudah diterapkan dimana proses yang digunakan bersifat sistematis dengan kerangka kerja yang jelas menghasilkan produk yang efektif, kreatif, dan efisien (Learning, 2008: 5). model ADDIE merupakan salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah di pelajari, terdiri dari 5 fase yaitu *analysis* (analisis), *design* (desain), *development* (pengembangan), *implementation* (implementasi), *evaluation* (evaluasi) (Molenda, 2008: 107). Masing-masing langkah tercantum dalam bagan 1 berikut:



**Bagan 1 Model Hipotetik Pengembangan Modul Edukasi *Islamic Financial and Halal literacy* dengan “ADDIE”**

Analisis merupakan langkah pertama dari model desain sistem pembelajaran ADDIE. Langkah analisis melalui dua tahap yaitu: 1) Analisis Kinerja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. 2) Analisis kebutuhan. analisis ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu di pelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Hal ini dapat dilakukan apabila program pembelajaran dianggap sebagai solusi dari masalah pembelajaran yang sedang dihadapi.

Berdasarkan hasil studi lapangan yang peneliti lakukan, diketahui bahwa pelaksanaan pelatihan dan pendampingan program pemberdayaan ekonomi di Dompot Dhuafa Yogyakarta masih belum memiliki standar dan tidak memiliki dokumentasi pelatihan yang dapat digunakan sebagai pegangan pada program pemberdayaan. Peneliti dalam hal ini akan mengembangkan modul edukasi keuangan islam dan produk halal. Modul edukasi ini akan dicetak dan diberikan sebagai pegangan peserta program dengan memasukkan *Islamic financial literacy* dan *Halal literacy* di dalam materi pelatihan.

Langkah desain merupakan inti dari langkah analisis kerja yaitu mempelajari masalah kemudian menemukan alternatif solusi yang berhasil diidentifikasi melalui langkah analisis kebutuhan. Dalam desain media, langkah yang akan dilakukan adalah menentukan materi Islamic Financial education dan halal education bagi pelaku usaha mikro. Materi pengelolaan keuangan usaha terdiri dari pengelolaan keuangan sederhana, transaksi yang bathil dalam perdagangan, hutang dan pinjaman, investasi dan asuransi. Materi edukasi halal terdiri dari definisi halal dan haram, produk halal, produk haram, bahan baku rawan haram dan cara membedakannya, dan juga sertifikasi halal.

Setelah materi tersusun, selanjutnya menyusun perangkat media. Media yang digunakan berupa modul. Draft media tersebut direvisi sehingga dihasilkan media yang sesuai dengan kebutuhan. Modul edukasi menurut Depdiknas (2008: 21-26) memuat komponen-komponen sebagai berikut:

a) Bagian Pembuka

Bagian pembuka ini terdiri dari judul, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.

b) Bagian Inti

Bagian inti ini terdiri atas :

- a. Pendahuluan atau tinjauan umum materi yang meliputi deskripsi pembelajaran, prasyarat menggunakan modul, petunjuk menggunakan modul, tujuan akhir, standar kompetensi dan kompetensi dasar dan tes awal.
- b. Hubungan dengan materi yang lain atau peta konsep,
- c. Uraian materi yang sistematikanya sebagai berikut:
- c) Kegiatan Belajar I: Judul
  - a. Tujuan Kompetensi
  - b. Uraian Materi
  - c. Tes Formatif
  - d. Tugas
  - e. Rangkuman
  - f. Umpan Balik atas penilaian
- d) Kegiatan Belajar 2: Judul, struktur seperti Kegiatan Belajar I.
- e) Bagian Penutup

Penutup dalam modul bisa terdiri dari glosary atau daftar istilah, tes akhir dan indeks.

Pengembangan merupakan langkah ketiga dalam model desain sistem ADDIE. Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli, dan memodifikasi bahan ajar. Dengan kata lain mencakup kegiatan memilih, menentukan metode, media serta strategi pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam menyampaikan materi atau substansi program. Dalam melakukan langkah pengembangan ada dua tujuan penting yang perlu dicapai, antara lain adalah memproduksi, merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Langkah kedua adalah memilih media atau mengkombinasi media terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Dalam tahap ini, draft media yang telah dibuat dan direvisi akan dilakukan validasi oleh tim ahli. Tim ahli yang terkait dalam validasi tersebut adalah ahli media dengan ahli pembelajaran. Setelah dilakukannya validasi maka layak untuk diimplementasikan pada tahap berikutnya. Kondisi kelompok program pemberdayaan harus dapat dipastikan telah siap, sehingga fasilitator dan peserta dipersiapkan juga untuk melaksanakan pelatihan dan pendampingan program pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan modul edukasi.

Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah keempat dalam model desain sistem pembelajaran ADDIE. Tujuan utama dari langkah ini adalah membimbing peserta untuk mencapai tujuan atau kompetensi, menjamin terjadinya pemecahan masalah untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh peserta, dan memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran, peserta perlu memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, *Islamic financial literacy* dan *Halal literacy*.

Pada tahapan implementasi media yang telah dirancang dilakukan dengan cara uji satu-satu, uji kelompok kecil, uji kelompok besar, dan uji fasilitator. Uji satu-satu, uji kelompok kecil, dan uji kelompok besar untuk mendapat masukan dari peserta. Uji fasilitator untuk mendapat masukan dari fasilitator yang menndampingi program pemberdayaan ekonomi. Pada uji satu-satu akan dipilih 3 peserta, uji kelompok kecil dipilih 6 peserta, dan uji kelompok besar dipilih 10 peserta, pemilihan peserta tersebut bersifat acak.

Evaluasi adalah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Evaluasi terhadap program pembelajaran bertujuan untuk mengetahui sikap peserta terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan, mengetahui peningkatan kompetensi dalam diri pesertayang merupakan dampak dari keikutsertaan dalam program pembelajaran, dan memperoleh keuntungan yang dirasakan oleh lembaga akibat adanya peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

Pada tahap ini, akan dilakukan uji efektivitas yang akan ditentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen akan diberi perlakuan yang telah peneliti setting dengan menggunakan modul edukasi, sedangkan kelompok kontrol menggunakan media lain. Tahap evaluasi dan revisi merupakan tahap yang terakhir. Pada tahap revisi dilakukan terhadap semua komponen yang telah dipilih. Komponen revisi yang paling penting adalah dari peserta, karena peserta tersebut sebagai pengguna dari media.

Menurut Departemen Agama Malaysia (Jakim), konsep halal didefinisikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum syariat (JAKIM, 2012). Makanan halal berarti diperbolehkan atau sah oleh hukum syariat di mana harus memenuhi beberapa kondisi yakni:

- a) Tidak terdiri dari bahan-bahan yang mengandung hewan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam yang disembelih tidak dengan aturan syariat.
- b) Tidak mengandung bahan-bahan yang najis menurut hukum syariat.
- c) Aman dikonsumsi dan tidak berbahaya.
- d) Tidak diproduksi menggunakan alat-alat yang terkena najis menurut hukum syariat. Makanan dan bahan yang terkandung didalamnya tidak mengandung bagian dari makhluk hidup yang tidak diperbolehkan menurut hukum syariat.
- e) Pada saat persiapan, proses, pengemasan, dan juga penyimpanan, makanan secara fisik terpisah dari makanan lainnya seperti dijelaskan diatas, atau apapun yang menurut hukum syariat didefinisikan sebagai najis.

Berdasarkan integrasi nilai-nilai Halal dan pendidikan *Financial literacy* di atas, pendidikan ini diharapkan dapat diterapkan pada pelaku usaha. Ketika terjadi peningkatan kualitas *Financial literacy* maka akan diikuti oleh kesadaran keuangan yang akan meningkatkan perekonomian. Namun diperlukan juga penanaman nilai-nilai produk halal agar kemahiran dalam mengelola keuangan diikuti dengan kualitas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Indonesia.

### **BAB III. KESIMPULAN**

1. Penggunaan modul edukasi yang dikembangkan dengan pendekatan ADDIE diharapkan dapat meningkatkan kualitas *Islamic financial and halal literacy*.
2. Belum adanya modul edukasi *Islamic financial and halal literacy* diharapkan menjadi

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tiada kata selain syukur yang terucap bagi Allah Yang Maha Kuasa atas nikmatnya selama ini. Tanpa kasih dan hidayah-Nya karya ini hanyalah sebuah wacana di angan. Terimakasih atas semua doa dan dukungan Bapak, Ibu dan Keluarga Yusuf Pratama, sahabat-sahabat di Dompot Dhuafa, FoSSEI Yogyakarta, serta dosen dan rekan di Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

### **REFEREN SI**

Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging *Islamic financial literacy* and *Halal literacy*: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37, 196-202.



- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An analysis of personal *financial literacy* among college students. *Financial services review*, 7(2), 107-128.
- Chen, H., & Volpe, R. P. (2005). *Financial literacy*, education, and services in the workplace. *A Journal of Applied Topics in Business and Economics*,(online),(Accessed: 2 Feb 2006) <http://www.westga.edu/~bquest/2005/workplace.pdf>.
- Daryanto, S. D. (2013). *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Gama Media.
- Depdiknas, P. B. (2008). *Panduan Pengembangan Pembelajaran IPA Terpadu*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Evans, A D and CJ Green & V Murinde. 2002. *Human Capital and Financial Development in Economic Growth: New Evidence Using the Translog Production Function*, *International Journal of Financial Economics*,7, 123-140, 2002.
- Giddens, Anthony. 2003. *Jalan Ketiga dan Kritik-kritiknya*. Edisi terjemahan, dari buku "The Third Way and Its Critiques", diterbitkan oleh Polity Press, Cambridge, 2000.
- Glaser, M., & Weber, M. (2007). Why inexperienced investors do not learn: They do not know their past portfolio performance. *Finance Research Letters*, 4(4), 203-216.
- Hung, A., Parker, A. M., & Yoong, J. (2009). Defining and measuring *financial literacy*.
- Huston, S. J. (2010). Measuring *financial literacy*. *Journal of Consumer Affairs*,44(2), 296-316.
- Huston, Sandra J. (2010). Measuring financial literacy. *The Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 296-316. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.pdf>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2015.
- INFE, O. (2012). Supplementary Questions: Optional Survey Questions for the OECD INFE *Financial literacy* Core Questionnaire. Retrieved March, 10, 2015.
- Jappelli, Tullio. 2010. *Financial literacy* An International Comparison. *Network for Studies on Pensions, Aging, and Retirement Discussion Paper 09/2010/064*.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). *Financial literacy* around the world: an overview. *Journal of Pension Economics and Finance*, 10(04), 497-508.
- Mohd Yusoff, H. (2004). Halal certification scheme. *Standard & Quality News*, 11, 4-5.
- Mulyono, S. E. (2015). MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN LITERASI BERBASIS KEWIRAUSAHAAN USAHA MANDIRI MELALUI PKBM DI KOTA SEMARANG. *Journal of Nonformal Education*, 1(1).
- Munadi, Y. (2013). *Media Pembelajaran*. Jakarta : Referensi (GP Prees Group)
- OECD. 2014. *PISA 2012 Results: Students and Money, Financial Literacy Skills for the 21st CENTURY* (Volume VI). OECD.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Laporan Rencana dan Pelaksanaan Edukasi PUJK 2014 serta Laporan Rencana Edukasi PUJK 2015*. Jakarta
- Reuters, T., & Standard, D. (2014). *State of the global Islamic economy 2014-2015 report*. May, available at: <http://halalfocus.net/wp-content/uploads/2015/01/SGIE-Report-2014.pdf>.

- SAIDAH, S. A., & Handajani, S. (2016). PENGEMBANGAN PERANGKAT PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS LIFE SKILL BAGI SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH V CUKIR JOMBANG. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*, 5(3).
- Singhal, A., Cody, M. J., Rogers, E. M., & Sabido, M. (Eds.). (2003). *Entertainment-education and social change: History, research, and practice*. Routledge.
- Smaldino, J. J., & Flexer, C. (2012). *Handbook of acoustic accessibility: Best practices for listening, learning, and literacy in the classroom*. Thieme.
- Soetrisno, N. (2015). Posisi dan Peran Pembangunan UKM 2004-2009. *INFOKOP*, 12(25).
- Sudjana, D. (2004). *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production.
- Sudjana, N., & Rivai, A. (2001). *Penggunaan Media Pengajaran dalam PBM*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono, D. R. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sunarsih, S., Rahmawati, R., & Qomaruzzaman, B. (2013). PENGEMBANGAN BUDAYA KEWIRAUSAHAAN BERBASIS SYARIAH UNTUK MENCIPTAKAN PENGUSAHA DARI LINGKUNGAN SANTRI PADA PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN JEMBER. *JURNAL RELASI STIE MANDALA JEMBER*, 18.
- Tan Beng Wah. 2011. *Of Value Proposition & Financial Literacy*, The 4E journal, vol.11 No.2, 2Q Certified Financial Planner® (CEP) Penerjemah: Imam Khoiri. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Wahyuni, I. N. (2015, November). PENGEMBANGAN PENDIDIKAN *FINANCIAL LITERACY* BERBASIS NILAI-NILAI ANTI KORUPSI SEBAGAI INVESTASI SOSIAL: SEBUAH PEMIKIRAN. In *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 1, No. 1).
- Xiao, J. J., Ahn, S. Y., Serido, J., & Shim, S. (2014). Earlier *financial literacy* and later financial behaviour of college students. *International Journal of Consumer Studies*, 38(6), 593-601.
- <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/751473-ukm-kuliner-di-yogya-banyak-belum-kantongi-sertifikat-halal/2>
- <http://www1.mastercard.com/content/intelligence/en/research/reports/2015/mastercard-financial-literacy-index-report-2014h1.html>